

PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

Oleh :

Rosi Rahayu¹, Kusrin², Hanny Purnamasari³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-Mail : rosirahayu97@gamil.com

ABSTRAK

Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang dilatar belakangi dengan belum tepat sasaran khususnya diKecamatan Cibuaya yaitu karena proses pembaruan data yang belum maksimal dimana data DTKS tidak pernah diupdate sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan ketidaktepat sasaran program karena dalam proses pendataan masih menggunakan data lama maka dari itu harus lebih ditingkatkan lagi terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Analisa hasil penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan dengan menggunakan teori menurut Budiani dengan 4 indikator yaitu, Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, Pemantauan program. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuannya untuk mengetahui apakah program yang dibuat pemerintah berjalan efektif atau tidak. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang yang dikaji melalui empat faktor menunjukkan Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, durasa masih belim maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu dan sudah memenuhi syarat tiddak mendapatkan bantuan, selanjutnya Tujuan program dan Pemantauan program masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kecamatan Cibuaya.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multimediasi yang daialami masyarakat indonesia untuk saat ini yang ditandai dengan rendahnya kualitas taraf hidup penduduk mulai dari aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan kehidupannya. Bisa kita lihat pada tabel

dibawah ini mengenai perkembangan penduduk miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang menurun, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017-2019

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017-2019		
Jumlah	Bulan	Tahun
26,58	September	2017
25,95	Maret	2018
25,67	September	2018
25,14	Maret	2019
24,79	September	2019

Sumber : (bps.go.id, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September 2017 berjumlah 26,58 juta jiwa. Maret tahun 2018 berjumlah 25,95 juta jiwa dan September 2018 yang berjumlah 25,67 juta jiwa. Jumlah pada bulan Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi pada bulan September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan pada posisi bulan Maret.

Penduduk miskin yang berada di wilayah Kabupaten Karawang sendiri terbilang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sejak tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin		
	2017	2018	2019
Karawang	236,84	187,96	173,66

Sumber : (bps.go.id, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Karawang mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2017 angka penduduk miskin pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 8,06% dan pada tahun berikutnya 2019 mencapai 7,39% walaupun penurunan setiap tahunnya tidak signifikan. Dilihat dari presentase

penduduk miskin di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cibuaya yang merupakan salah satu kecamatan sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan yang dimana menjadi lokus penelitian penulis. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di kabupaten karawang dirasa belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah, sehingga program Keluarga Harapan ini dirasa belum mengurangi kemiskinan di Kabupaten karawang dan khususnya di Kecamatan Cibuaya.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh untuk menghindari semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pengentasan kemiskinan sangat perlu di dilakukan secara komprehensif yang melibatkan semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah desa, maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan direalisasikan melalui berbagai Program untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat mulai dari aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Dan salah satu program yang diluncurkan pemerintah yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan merupakan program unggulan yang meluncurkan pemerintah sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan, yang dilaksanakan serentak pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan yang disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Landasan hukum dan dasar pelaksanaan Program Keluarga

Harapan tertera pada : 1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, 3. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 4. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 5. Inpres nomor 1 Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi dinegara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Berdasarkan data dan fakta dari hasil analisis data-data dan dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang menggunakan model teori Efektivitas Program dari Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyo 2017. Terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu : 1. Ketepatan Sasaran Program, 2. Sosialisasi Program, 3. Tujuan Program, 4. Pemantauan Program. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, masih banyak masyarakat miskin yang sudah memenuhi komponen tetapi tidak mendapatkan

bantuan dari Program Keluarga Harapan. Dari indikator sosialisasi program di Kecamatan Cibuyaya masih belum optimal disebabkan karena para Pelaksana kurang giat dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dengan adanya program tersebut tidak serta merta agar masyarakat itu miskin terus akan tetapi dengan diluncurkannya program ini agar masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak terpuruk dalam kemiskinan agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. indikator tujuan program, dibentuknya sebuah program pasti bertujuan baik salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi masyarakat yang miskin tidak mau mandiri untuk mengurus rumah tangganya, mereka malah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tidak mau bangkit dari kemiskinan dan kemungkinan di Kecamatan Cibuyaya masyarakat miskin akan terus bertambah dan jumlah penerima bantuanpun akan terus meningkat. indikator pemantauan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang, sudah dikatakan cukup efektif, akan tetapi pemantauan program perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan update informasi secara mendetail terkait permasalahan yang terjadi dilapangan.

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul usulan penelitian mengenai: **“Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang”**

B. KAJIAN PUSTAKA

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan *effectivitas* sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).
- b. Chung dan Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung dan Magginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar hidup organisasi tetap survive (*hidup*).

Arnes and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999: 765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arnes and Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- a. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).
- b. Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.
- c. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :
 1. Keberhasilan program
 2. Keberhasilan sasaran
 3. Kepuasan terhadap program
 4. Tingkat input dan output
 5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dan melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sehingga tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (1989:47).

Terdapat beberapa model Efektivitas Program, tetapi model teori Efektivitas Program yang relevan dengan penelitian yaitu model Efektivitas Program Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyo

(2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. **Ketepatan Sasaran Program**
Pemahaman program dalam hal ini sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan program.
- b. **Sosialisasi Program**
Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang konkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana stakeholder atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya. Mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program.

- c. **Tujuan Program**

Tujuan Program yaitu, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

- d. **Pemantauan Program**

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam hal ini pemantauan program berupa evaluasi yang dapat diukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

Keempat indikator diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena diantara satu dengan yang lainnya saling berkaitan .

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi serta pemantuan program supaya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya bisa tercapai sesuai rencana.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dilakukannya wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan sumber data primer yaitu pedoman wawancara dan rekaman hasil wawancara bersama kepala bidang bagian penanganan Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH, TKSK, PSM, Kasie Pemerintahan Desa Kedungjeruk, Kasie Pemerintahan Desa Kedungjaya, serta masyarakat Kecamatan Cibuaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

- a. Reduction Data (Reduksi Data)
- b. Data Display (Penyajian Data)
- c. Conclusion Data/verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud untuk lebih mengenali dan menggali mengenai permasalahan Program Keluarga Harapan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107o02' – 107o40' dan 5o562' LS. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha. Berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Subang

3. Sebelah Tenggara: Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
4. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur
5. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi Dari sisi administrasi, Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan, 297 Desa dan 12 Kelurahan.

Kemiskinan merupakan masalah multimediasi yang dialami masyarakat indonesia untuk saat ini yang ditandai dengan rendahnya kualitas taraf hidup penduduk mulai dari aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan kehidupannya. Bisa kita lihat pada tabel dibawah ini mengenai perkembangan penduduk miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang menurun, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017-2019

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017-2019		
Jumlah	Bulan	Tahun
26,58	September	2017
25,95	Maret	2018
25,67	September	2018
25,14	Maret	2019
24,79	September	2019

Sumber : (bps.go.id, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September 2017 berjumlah 26,58 juta jiwa. Maret tahun 2018 berjumlah 25,95 juta jiwa dan September 2018 yang berjumlah 25,67 juta jiwa. Jumlah pada bulan Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar

9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi pada bulan September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan pada posisi bulan Maret.

Penduduk miskin yang berada di wilayah Kabupaten Karawang sendiri terbilang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sejak tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin		
	2017	2018	2019
Karawang	236,84	187,96	173,66

Sumber : (bps.go.id, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Karawang mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2017 angka penduduk miskin pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 8,06% dan pada tahun berikutnya 2019 mencapai 7,39% walaupun penurunan setiap tahunnya tidak signifikan. Dilihat dari presentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cibuaya yang merupakan salah satu kecamatan sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan yang dimana menjadi lokus penelitian penulis. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di kabupaten karawang dirasa belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah, sehingga program Keluarga Harapan ini dirasa belum mengurangi Kemiskinan di Kabupaten karawang dan khususnya di Kecamatan Cibuaya.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis dan akan membahas mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Data yang peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada pembahasan ini akan menjelaskan dan menyajikan data dan fakta dari hasil analisis data-data dan dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang menggunakan model teori Efektivitas Program dari Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyo 2017. Terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu : 1. Ketepatan Sasaran Program, 2. Sosialisasi Program, 3. Tujuan Program, 4. Pemantauan Program. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran Program Keluarga Harapan masih terus dilakukan penambahan penerima bantuan. Dengan diusulkannya bagi warga yang tidak mampu dan memiliki komponen melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang kemudian data tersebut disampaikan kepada Kepala Desa lalu kepada TKS kemudian diinput melalui sistem kepada Kementerian Sosial agar calon Keluarga Penerima Manfaat bisa mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan bantuan PKH walaupun data yang diusulkan belum terealisasikan.

PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain: 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan. 2. Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program. 3. Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial. 4. Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara Nasional. 7. Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH. 8. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu. 9. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen :



Gambar 17. Komponen KPM PKH

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

- Kriteria komponen kesehatan meliputi: 1) ibu hamil/menyusui; dan 2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Kriteria komponen pendidikan meliputi: 1) anak SD/MI atau sederajat; 2) anak SMP/MTs atau sederajat; 3) anak SMA/MA atau sederajat; dan 4) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan 2) penyandang disabilitas berat. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, 4 dan 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016)

Komponen tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH, yang disebut dengan bantuan bersyarat, jadi apabila ada masyarakat yang terbilang miskin namun tidak memiliki komponen tersebut maka tidak berhak mendapatkan bantuan program ini.

Para pelaksana Program Keluarga Harapan yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan PKH melakukan pendampingan sosial pada saat berjalannya sebuah program serta dengan menjalin relasi kepada masyarakat untuk membantu mengungkapkan kebutuhan masyarakat dan penyalur aspirasi bagi masyarakat dengan memahami masalah-masalah yang terjadi didalam lingkungan masyarakat serta mencari strategi dan solusi sebagai cara untuk menuntaskan permasalahan. Selanjutnya menerapkan strategi yang sudah dibentuk dengan mengembangkan kemampuan guna mengatasi segala

permasalahan agar berjalannya suatu program lebih efektif. Pada tahap selanjutnya pendampingan sosial terhadap masyarakat yaitu dengan menyusun rencana kerja baru yang lebih terfokus, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan PKH.

Berdasarkan analisis terhadap indikator ketepatan sasaran program bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang belum cukup efektif, karena masih banyak masalah yang dihadapi dilapangan mulai dari Tidak terupdatenya data DTKS sehingga menyebabkan ketidak tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang tidak mau mandiri dengan kehidupannya dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, bagaimana program ini bisa mengentaskan kemiskinan jika masyarakat hanya mengharap diberi, pemerintah mengeluarkan sebuah program tujuannya sangat baik akan tetapi masih banyak masyarakat atau bahkan para pelaksana program tersebut tidak menyikapinya dengan bijak, selain itu Dinas Sosial dan Pendamping tidak menggandeng para aparat desa maupun kecamatan bagaimana program tersebut dapat dikatakan efektif jika koordinasi antar pelaksana program saja tidak ada.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Sosialisasi program merupakan dasar awal dalam melakukan sebuah kegiatan guna menjabarkan suatu rencana

yang sudah ditentukan sebelumnya, unsur terpenting dari jalannya sebuah program yaitu agar terciptanya sebuah kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Melalui kegiatan sosialisasi maka sebuah program dapat dikenalkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat berjalannya sebuah program.

Dinas sosial beserta SDM PKH berkewajiban untuk mensosialisasikan sebuah program yang sedang berlangsung di masyarakat, agar program yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik, salah satu program yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan, sosialisasi merupakan salah satu kegiatan pokok untuk dilakukan oleh pemerintah melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi baik secara lisan, tulisan maupun penyampaian informasi kepada individu, keluarga penerima manfaat, dan kelompok masyarakat agar tercapainya sebuah program yang efektif.

Bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibuya memberikan sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat dengan melibatkan SDM PKH tingkat pusat, daerah maupun masyarakat yang sesuai dengan buku pedoman PKH yang dikeluarkan oleh kementerian sosial sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan PKH. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyamanan persepsi bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah, SDM pelaksana PKH pusat dan daerah serta masyarakat, perlu dilakukannya sosialisasi sebagai salah satu kunci sukses pelaksanaan PKH, Dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas Sosial tidak turun langsung akan tetapi melalui SDM

PKH. Secara garis besar kelompok sasaran sosialisasi PKH, meliputi:

1. Pelaksana PKH

- a. Tingkat Pusat, adalah para perumus kebijakan dan penentu kebijakan dipusat yang mempengaruhi pelaksanaan program PKH, seperti: Tim Pengendali /Koordinasi, Tim Pengarah, Tim Teknis Pelaksanaan PKH Pusat, kementerian/ lembaga lain yang terkait, termasuk seluruh anggota kabinet, DPRD, Media; Kelompok Strategis seperti : LSM, Ormas, Lembaga Donor, Kelompok Profesional dan kelompok lainnya.
- b. Tingkat Provinsi, adalah para perumus kebijakan dan penentu kebijakan pada provinsi yang memengaruhi pelaksanaan program PKH seperti: LSM, Ormas, Kelompok Profesional dan kelompok lainnya.
- c. Tingkat Kabupaten/Kota, adalah para perumus kebijakan, penentu kebijakan dan pelaksana program pada daerah yang mempengaruhi pelaksanaan PKH seperti: Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH Kabupten/Kota, DPRD, Media; Kelompok Strategis seperti : LSM, Ormas, Kelompok Profesional dan kelompok lainnya.
- d. Tingkat Kecamatan, adalah para pelaksana program pada daerah kecamatan seperti: Camat, Pelaksana PKH Kecamatan, Organisasi Sosial dan kelompok-kelompok masyarakat setempat.

2. Materi sosialisasi

Materi sosialisasi PKH berisi muatan informasi tentang mekanisme dan alur pelaksanaan PKH, hasil kajian dan evaluasi tentang PKH, berbagai kebijakan pelaksana PKH.

Dari indikator sosialisasi program di Kecamatan Cibuaya masih belum optimal disebabkan karena para Pelaksana kurang giat dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dengan adanya program tersebut tidak serta merta agar masyarakat itu miskin terus akan tetpi dengan diluncurkannya program ini agar masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak terpuruk dalam kemiskinan agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

3. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Setaip program yang dibuat dan disusun tentunya mrmiliki langkah awal dlam proes yaitu tujuan pencapaian yang dicita-citakan dengan indikator sebuah keberhasilan. Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kualitas taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, perubahan perilaku kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal.

Program Keluarga Harapan ini salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat walaupun dirasa jumlahnya tidak seberapa. Peran dan fungsi Dinas Sosial dan Pendamping sebagai SDM PKH sangat diperlukan demi

tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu diperlukan adanya pengetahuan peran dan fungsi Pendamping PKH salah satunya dengan melakukan koordinasi dan sinergitas dengan melihat potensi serta kesejahteraan masyarakat baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, untuk mengetahui sejauhmana SDM PKH membantu pemerintah untuk mencapai tujuan berhasilnya sebuah program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan, pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH.

1. Pendamping sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampungannya dilaksanakan setiap bulan.
2. Pendamping sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran.
3. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
4. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dari indikator tujuan program peneliti melihat bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang masih belum dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat miskin di kecamatan cibuyaya yang belum mendapatkan bantuan keluarga harapan selain itu juga dengan bantuan yang bervariasi jumlahnya tidak bisa untuk mengentaskan kemiskinan, selain masalah tersebut sebenarnya tujuan dibuatnya suatu program pasti baik akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menyikapinya, dengan adanya program ini pemerintah berharap agar masyarakat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri. tujuan Program Keluarga Harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meringkaskan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat, bagaimana tujuannya bisa tercapai jika masalah ini terus dibiarkan bisa saja masyarakat yang miskin tidak mau mandiri untuk mengurus rumah tangganya, mereka malah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tidak mau bangkit dari kemiskinan dan kemungkinan di Kecamatan Cibuyaya masyarakat miskin akan terus bertambah dan jumlah penerima bantuanpun akan terus meningkat.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan program tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Sosial dan SDM PKH.

Dalam proses pemantauan Program Dinas Sosial mengawasi kinerja Pendamping PKH guna efektivitas sebuah program dengan cara rapat koordinasi dan evaluasi untuk setiap bulannya, Dimana jika terjadi permasalahan dilapangan maka Pendamping PKH akan membuat laporan Kepada Dinas Sosial lalu Dinas Sosial bersurat kepada Kementerian Sosial guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH, monitoring atau pemantauan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program PKH dilaksanakan. Kegiatan monitoring menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program (Khandker dkk., 2010). Ruang lingkup pemantauan PKH secara umum dilaksanakan pada sisi input, proses dan output. Kegiatan monitoring PKH didesain menjadi sebuah sistem yang menyatu dengan seluruh aspek pelaksanaan program.

a. Monitoring

Monitoring dilaksanakan secara terus menerus, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung atau dengan cara menganalisis laporan dan perkembangan pelaksanaan PKH dalam waktu tertentu melalui pengumpulan data dan informasi tentang implementasi program.

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring PKH terdiri dari indikator masukan dan indikator keluaran.

Kedua kategori ini akan diperoleh dari hasil analisis data MIS (*Management Information System*) PKH secara berkala.

1. Tujuan Monitoring

Secara umum monitoring PKH bertujuan untuk :

- a) Mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan PKH berjalan dengan baik.
- b) Memastikan jadwal PKH yang telah disusun satu tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan masukan kepada penanggungjawab PKH mengenai upaya perbaikan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan PKH.

2. Pelaksana Monitoring

- a) Monitoring oleh Pemerintah Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKH serta pencapaian target sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah melakukan monitoring secara berkala agar pelaksanaan PKH sesuai rencana dan mekanisme yang ditetapkan, seperti ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan.
- b) Monitoring oleh pemangku kepentingan terkait Kegiatan monitoring PKH juga dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, seperti: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lembaga lainnya.

c) Monitoring dengan partisipasi masyarakat
Monitoring oleh masyarakat melibatkan warga masyarakat secara luas dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Dalam PKH ada kelompok ibu yang dipilih dan ditugaskan untuk memastikan pelaksanaan PKH: apakah itu pemutakhiran data, kondisi KPM PKH, dan bantuan yang diterima KPM PKH.

3. Pengumpulan Data dan Analisis

Pengumpulan data dilakukan oleh tenaga lapangan dan manajemen data dilakukan oleh tim MIS (*Management Information System*) PKH. Analisis data monitoring secara rutin dilakukan oleh Pelaksana PKH Pusat.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dan dampak pelaksanaan PKH.

Untuk menjamin pengukuran yang akurat diperlukan survei dasar (*baseline survey*) yang menjadi titik tolak dari pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH.

1) Tujuan Evaluasi

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan.
- b. Mengetahui dan menganalisa hal-hal lain yang mungkin timbul di luar yang telah rencana.

c. Memberikan masukan kepada penanggungjawab PKH mengenai upaya perbaikan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan PKH.

2) Cakupan Evaluasi

Berdasarkan tujuan dan keluaran program yang ingin dicapai, diperlukan indikator kinerja program untuk mengukur pencapaian program selama kurun waktu satu tahun. Pengukuran indikator kinerja program dilakukan secara berkala dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait secara berjenjang.

indikator pemantauan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibauaya Kabupaten Karawang, sudah dikatakan cukup efektif, akan tetapi pemantauan program perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan update informasi secara mendetail terkait permasalahan yang terjadi dilapangan, identifikasi potensi sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat, kemudian akan terjadi pemetaan sosiasal agar upaya untuk membantu menemukan dan mengenali masalah, potensi dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fungsi peran dari para Pelaksana Program dapat berjalan dengan efektif.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi data-data mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibauaya Kabupaten Karawang belum sepenuhnya efektif karena masih banyak

ketidaktepat sasaran dalam penyaluran dari Program Keluarga Harapan.

1. Indikator Ketepatan Sasaran Program
Penerima sasaran bantuan dari Program Keluarga Harapan ini masih terkendala oleh pendataan oleh teknis melalui data BPS dan data DTKS melalui SIKS-NG yang belum terupdate. Sehingga mengakibatkan ketidaktepatsasaran dan membuat Dinas Sosial dan Pendamping PKH kesulitan untuk mendeteksi warga yang berhak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut. sasaran Program Keluarga Harapan masih terus dilakukan penambahan penerima bantuan. Dengan diusulkannya bagi warga yang tidak mampu dan memiliki komponen melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang kemudian data tersebut disampaikan kepada Kepala Desa lalu kepada TKSK lalu diinput melalui sistem kepada Kementerian Sosial agar calon Keluarga Penerima Manfaat bisa mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan bantuan PKH walaupun data yang diusulkan belum terealisasikan.
2. Indikator Sosialisasi Program
kesimpulan dari indikator sosialisasi program di Kecamatan Cibuya masih belum optimal disebabkan karena para Pelaksana kurang giat dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dengan adanya program tersebut tidak serta mereta agar masyarakat itu miskin terus akan tetapi dengan diluncurkannya program ini agar masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak terpuruk dalam kemiskinan

agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

3. Indikator Tujuan Program
Dapat disimpulkan dari indikator tujuan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang masih belum dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat miskin dikecamatan cibuya yang belum mendapatkan bantuan keluarga harapan selain itu juga dengan bantuan yang bervariasi jumlahnya tidak bisa untuk mengentaskan kemiskinan, selain masalah tersebut sebenarnya tujuan dibuatnya suatu program pasti baik akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menyikapinya, dengan adanya program ini pemerintah berharap agar masyarakat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri. tujuan Program Keluarga Harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat, bagaimana tujuannya bisa tercapai jika masalah ini terus dibiarkan bisa saja masyarakat yang miskin tidak mau mandiri untuk mengurus rumah tangganya, mereka malah hanya

mengandalkan bantuan dari pemerintah tidak mau bangkit dari kemiskinan dan kemungkinan di Kecamatan Cibuaya masyarakat miskin akan terus bertambah dan jumlah penerima bantuanpun akan terus meningkat.

4. Indikator Pemantauan Program

Kesimpulan dari analisis indikator pemantauan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sudah dikatakan cukup efektif, akan tetapi pemantauan program perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan update informasi secara mendetail terkait permasalahan yang terjadi dilapangan, identifikasi potensi sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat, kemudian akan terjadi pemetaan sosial agar upaya untuk membantu menemukan dan mengenali masalah, potensi dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fungsi peran dari para Pelaksana Program dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan yang telah dituliskan pada pembahasan, maka agar Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan diKecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang dapat berjalan secara optimal dan efektif, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program, agar lebih ditingkatkan dalam hal pembaharuan data DTKS sehingga yang mendapatkan bantuan memang

benar-benar dari masyarakat miskin yang memiliki komponen selain itu juga para pelaksana PKH agar lebih teliti dalam hal pendataan dimana masih banyak menggunakan data lama, hal tersebut merupakan salah satu kendala ketidak tepatan sasaran program.

2. Sosialisasi Program yang diberikan oleh pendamping PKH kepada masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat memberikan informasi program yang lebih maksimal dan sesuai berdasarkan Buku Pedoman PKH agar masyarakat lebih memahami tanggung jawab apa saja yang harus mereka lakukan serta lebih memahami mekanisme manfaat dan tujuan pelaksanaan PKH.
3. Tujuan Program, tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tujuan Program Keluarga Harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluarag dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Dalam proses pencapaian tujuan tentunya harus ada sinergi antara pelakasana program dan penerima program agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai.
4. Pemantauan Program oleh para SDM PKH, peneliti berharap dalam proses pembaharuan data yang diusulkan

oleh desa Kepada Dinas Sosial mewajibkan memverifikasi data satu bulan satu kali agar para penerima bantuan memang betul-betul dari masyarakat miskin, dan peneliti berharap agar pendamping PKH lebih giat dalam melakukan pemantauan karena yang saya lihat dilapangan masih banyak masalah yang dihadapi oleh para penerima manfaat dari program keluarga harapan selain itu Dinas Sosial dalam menyikapi suatu permasalahan dinilai lambat dan prosesnya panjang untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan untuk itu kami berharap Dinas Sosial harus lebih sigap dalam menyikapi persoalan yang terjadi dimasyarakat guna efektifnya suatu program Pemantauan Program oleh para SDM PKH, peneliti berharap dalam proses pembaharuan data yang diusulkan oleh desa Kepada Dinas Sosial mewajibkan memverifikasi data satu bulan satu kali agar para penerima bantuan memang betul-betul dari masyarakat miskin, dan peneliti berharap agar pendamping PKH lebih giat dalam melakukan pemantauan karena yang saya lihat dilapangan masih banyak masalah yang dihadapi oleh para penerima manfaat dari program keluarga harapan selain itu Dinas Sosial dalam menyikapi suatu permasalahan dinilai lambat dan prosesnya panjang untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan untuk itu kami berharap Dinas Sosial harus lebih sigap dalam menyikapi persoalan

yang terjadi dimasyarakat guna efektifnya suatu program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarief, D. S. (2015). *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. bps.go.id. (n.d.). *No Title*. <https://www.bps.go.id/subject/23/ke-miskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Y. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada (H. Wahyuni (ed.))*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Djam'an, S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta.